

PERAN HUKUM PERDATA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI: PERBANDINGAN INDIA DAN RUSIA DALAM KONTEKS BRICS

Tiyas Vika Widyastuti¹, Ajeng Tri Normalita Putri², Kiki Agus Finaningrum³, Aisyatun Nurkhasanah⁴, Anis Mashdurohatun⁵, dan Bambang Tri Bawono⁶

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

^{5,6} Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
tyasvika_widyastuti@upstegal.ac.id

Abstract

This study analyzes Indian and Russian civil law in the context of economic growth, focusing on comparisons between the two countries within the BRICS framework. It uses methods of literature study to identify differences and similarities in civil law development in India and Russia. The results of the analysis show that although India and the Russian Federation do not show outstanding environmental performance compared to the other BRICS countries, both have environmental sustainability as a top priority in their economic development policies. In terms of intellectual property, Russia is seen as the most actively engaged country in the IP agreement within the BRICS, especially when compared to India. Although there are differences in the procedures for registering trademarks, both indicate compliance with the integrated model.

Keywords: BRICS; Civil Law; Consumer Protection; Environmental Protection; Intellectual Property

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hukum perdata India dan Rusia dalam konteks pertumbuhan ekonomi, fokus pada perbandingan di antara kedua negara dalam kerangka kerja BRICS. Menggunakan metode studi literatur untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam perkembangan hukum perdata di India dan Rusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun India dan Rusia tidak menunjukkan kinerja lingkungan yang mencolok dibandingkan dengan negara BRICS lainnya, keduanya memiliki keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi mereka. Penelitian ini menekankan peran Undang-undang lingkungan dalam mencapai dampak yang berkelanjutan terhadap lingkungan di kedua negara. Dalam hal kekayaan intelektual, Rusia terlihat sebagai negara yang paling aktif terlibat dalam perjanjian kekayaan intelektual di dalam BRICS, terutama jika dibandingkan dengan India. Meskipun terdapat perbedaan dalam prosedur pendaftaran merek dagang, keduanya menunjukkan kepatuhan terhadap model terpadu.

Kata kunci : BRICS; Hukum Perdata; Perlindungan Konsumen; Perlindungan Lingkungan; Hak Kekayaan Intelektual

A. Pendahuluan

Dalam lanskap global saat ini, peran sistem hukum dalam membentuk dan mempengaruhi pembangunan ekonomi memiliki signifikansi tinggi berdasarkan aspek fungsionalnya dalam menyejahterakan rakyat dalam suatu negara.¹ Hukum memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu masyarakat². Signifikansinya dapat dilihat dari berbagai aspek yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pertumbuhan ekonomi yang stabil, adil, dan kondusif.³ Kehadiran Undang-undang dalam sistematika hukum yang berlaku mampu memberikan kerangka kerja untuk perlindungan hak milik individu atau kelompok. Hak kepemilikan yang terjamin merupakan hal mendasar bagi pembangunan ekonomi karena mendorong investasi, inovasi, dan kewirausahaan secara masif berdasarkan peluang tiap individu.⁴ Suatu individu, kelompok, dan berbagai bagian dari dunia usaha akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk berinvestasi hingga mengembangkan aset jika mereka yakin bahwa hak milik mereka dilindungi secara hukum.⁵

Hukum perdata memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi, terutama di India dan Rusia, di mana supremasi hukum yang stabil menciptakan lingkungan optimal untuk bisnis dan diplomasi, serta memberikan kerangka bagi operasionalitas bisnis dan penyelesaian perselisihan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,

sebagaimana dinyatakan dalam proyek penelitian yang didukung oleh Clifford Chance.⁶ Hukum perdata adalah sistem hukum tertulis yang memberikan kerangka bagi bisnis dan penyelesaian perselisihan, berbeda dengan *common law* yang bergantung pada keputusan dan preseden pengadilan.⁷

Rusia dan India telah meningkatkan kapasitas hukum perdagangan mereka secara dramatis, mengoordinasikan partisipasi dalam sengketa hukum dengan kebijakan dalam negeri, dan memanfaatkan hukum WTO untuk membuka pasar luar negeri serta melindungi kebijakan dalam negeri.⁸ Sejak tahun 1991, India telah mengimplementasikan serangkaian reformasi ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan sebagai respons terhadap krisis mata uang asing yang memengaruhi perkembangannya. Langkah-langkah reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan terhadap peluang transaksi global.⁹

Laju pertumbuhan PDB Rusia juga menunjukkan proyeksi yang bervariasi. Menurut Trading Economics, PDB Rusia meningkat sebesar 5,50 persen pada kuartal ketiga tahun 2023, dan tingkat pertumbuhan tahunan diperkirakan sebesar 5,00 persen pada akhir kuartal tersebut.¹⁰ Namun sumber lain memberikan pandangan berbeda. Uni

¹ Azizah, S. (2012). “Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum”. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

² Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). “Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi”. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83-93.

³ Iyan, R. Y. (2012). “Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(5).

⁴ Sidiq, S. (2023). “Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39-59.

⁵ Andreas, V. (2020). “Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi”. *Lex Privatum*, 7(5).

⁶ Clifford Chance. (2015). *The Rising Powers: What role does law have to play in the economic development of the BRIC countries?*. Retrieved from <https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2015/03/the-rising-powers-what-role-does-law-have-to-play-in-the-economic-development-of-the-bric-countries.pdf>.

⁷ Hidayat, A. (2019). “Kajian Kritis Terhadap Hukum Perdata (KUHPERDATA) Dalam Aspek Filosofis”. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 20-31.

⁸ Rolland, S. E. (2013). “The BRICS’ contributions To The Architecture And Norms Of International Economic Law”. In *Proceedings of the ASIL Annual Meeting (Vol. 107, pp. 164-170)*. Cambridge University Press.

⁹ Sumbari, T., & Harto, S. (2016). *Pengaruh Reformasi Ekonomi India Mengenai Foreign Direct Investment (Fdi) Terhadap Strategi Investasi Softbank Group Corporation Di India 2013-2016* (Doctoral dissertation, Riau University).

¹⁰ Trading Economics. (2023). “Russia GDP Annual Growth Rate”. Retrieved from <https://tradingeconomics.com/russia/gdp-growth-annual>.

Eropa memperkirakan PDB Rusia mungkin turun 2,5% dalam skenario terburuk atau sebesar 0,2%.¹¹ *The World Bank* juga awalnya memperkirakan perekonomian Rusia akan berkontraksi sebesar 4,5 persen pada tahun 2022.¹² Focus Economics juga melaporkan bahwa pertumbuhan PDB meningkat menjadi 5,5% tahun ke tahun di Kuartal 3, dari 4,9% di Kuartal 2, sehingga menandai pertumbuhan terkuat sejak Kuartal 2 tahun 2021.¹³

Aspek yang membuat menarik bagi analisis perbandingan hukum perdata dalam implikasi ekonominya bagi India dan Rusia adalah fakta bahwa mereka tergabung dalam kelompok negara yang sama, yakni BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) dengan pengaruhnya yang signifikan terhadap urusan regional dan global, serta konsep kerja sama dalam masalah ekonomi hingga politik.¹⁴ Saat ini, *output* atau hasil ekonomi kolektif negara-negara BRIC menyumbang 25,6% PDB global pada tahun 2015 dengan proyeksi yang menunjukkan peningkatan menjadi 33% pada tahun 2020, sehingga menandakan dampaknya yang kuat terhadap perekonomian global.¹⁵ Kelompok BRICS yang awalnya dibentuk sebagai alternatif ekonomi terhadap tatanan internasional yang dipimpin Barat dan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan global dan

tatanan internasional.¹⁶

Rusia bergantung pada ekspor komoditas sementara India berkembang sebagai negara dengan perekonomian domestik besar, yang secara kolektif menjadikan keduanya sebagai negara-negara BRICS yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global, dengan perkiraan bahwa BRICS akan melampaui kekuatan ekonomi utama dalam waktu dekat, terutama didorong oleh pertumbuhan pesat Tiongkok dan India.¹⁷ Kemunculan negara-negara BRICS sebagai sumber kekuatan ekonomi di kancah global telah memicu minat dan perdebatan di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan pakar industri. Selain indikator makro ekonomi dan pertimbangan geopolitik, landasan hukum yang mendasari negara-negara tersebut memainkan peran penting dalam menentukan ketahanan hingga keberlanjutan ekonomi mereka.¹⁸

Hukum yang berlaku dalam pemerintahan memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi negara-negara BRICS dengan kontribusi terhadap pertumbuhan dan kemajuan melalui inisiatif pembentukan lembaga-lembaga formal, informal, dan transisi, yang mendukung prinsip dasar supremasi hukum untuk pembangunan jangka panjang.¹⁹ Meskipun BRICS memiliki signifikansi ekonomi global, terdapat kesenjangan yang signifikan antara India dan Rusia, dengan India menghadapi defisit transaksi berjalan dan tantangan dalam akses terhadap pendidikan serta infrastruktur, yang dapat menjadi hambatan bagi pembangunan di masa depan.²⁰

¹¹ European Council. (2023). “Infographic - Impact of sanctions on the Russian economy”. Retrieved from <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/>.

¹² World Bank. (2023). The World Bank in Russia. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/russia>.

¹³ Focus Economics. (2023). *Russia Economic Forecast*. Retrieved from <https://www.focus-economics.com/countries/russia/>.

¹⁴ Mustafa, S., Zafar, A., & Akhter, S. (2017). “BRICS: Is the Group Really Creating Impact?”. *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)*, 2(6).

¹⁵ Siddiqui, K. (2016). “Will the growth of the BRICs cause a shift in the global balance of economic power in the 21st century?”. *International Journal of Political Economy*, 45(4), p.315-338.

¹⁶ Putri, F. M., & Santoso, M. P. T. (2023). “BRICS Diplomacy: Building Bridges for Global Cooperation”. *Politics and Humanism*, 2(1), p.10-21.

¹⁷ Dhar, B. (2012). “The BRICS in the emerging global economic architecture”.

¹⁸ Lowe, P. (2016). “The rise of the BRICS in the global economy”. *Teaching geography*, 41(2), p.50-53.

¹⁹ Ramanujam, N., & Caivano, N. (2016). “The BRIC Nations and the anatomy of economic development: the core tenets of Rule of Law”. *Law and Development Review*, 9(2), p.269-320.

²⁰ Schrooten, M. (2011). “Brazil, Russia, India, China and South Africa: strong economic growth-major challenges”. *DIW Economic Bulletin*, 1(4), p.18-22.

Sistem hukum perdata Rusia, dipengaruhi oleh tradisi hukum Romawi dan Napoleon, mendapat kritik karena kurangnya independensi peradilan, tidak adanya penegakan keputusan pengadilan, hambatan terhadap sistem perlindungan hak asasi manusia internasional, dan kewenangan penuntutan yang berlebihan.²¹ Sistem peradilan Rusia juga tidak memiliki supremasi hukum dan masyarakat sipil yang memberdayakan masyarakat secara optimal.²²

Sistem hukum India, perpaduan unik antara hukum perdata, *common law*, hukum adat, hukum agama, dan hukum perusahaan, termasuk hukum Hindu yang signifikan dalam masalah hukum keluarga, tidak sepenuhnya terkodifikasi dan dipengaruhi oleh preseden peradilan yudisial.²³ Penggabungan tradisi hukum Hindu, tradisi hukum Islam, dan unsur tradisi hukum adat mencerminkan kekayaan warisan budaya dan sejarah India. Kerangka kerja yang beragam ini mendorong adanya pendekatan komprehensif untuk menangani berbagai permasalahan hukum hingga memberikan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam sistem hukum.²⁴

Dalam sistem hukum yang kental dengan adat dan budaya, kompleksitas hidup bersama berbagai tradisi hukum dapat menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan dan memastikan konsistensi, sementara ketergantungan pada preseden peradilan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam Undang-undang.²⁵ Kritik terhadap sistem perdata di negara BRICS, termasuk lemahnya Undang-undang hak kekayaan intelektual, tingginya tingkat pembajakan, dan

kebijakan perizinan yang mendukung produsen obat generik, masih menjadi polemik, dengan Rusia dan India mendapat penilaian terburuk dalam perlindungan hak cipta²⁶.

Tantangan dalam hukum perdata terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui lemahnya Undang-undang paten dan hak cipta, tingginya tingkat pembajakan, serta sikap pilih kasih terhadap produsen obat generik, yang dapat menghambat inovasi, investasi, dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan di negara-negara BRICS.²⁷ Adapun tantangan dalam hukum perdata kedua negara ini mengenai ketentuan kebangkrutan dan penyelesaian sengketa mencakup ketidakpastian dalam proses arbitrase mengenai cara menentukan dampak kebangkrutan, kurangnya konsistensi antar yurisdiksi *common law* dalam kasus di mana utang atau tuntutan silang tidak tunduk pada suatu tuntutan hukum berupa perjanjian arbitrase, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian masalah kebangkrutan.²⁸

Tantangan hukum perdata BRICS saat ini juga dapat mendukung atau menghambat pengembangan pasar keuangan. Proses BRICS sering dipandang tertutup, dimana pemerintah dan dunia usaha menjalankan agendanya secara tertutup. Kurangnya transparansi dapat mempersulit aktor masyarakat sipil untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan dan proyek tersedia dan bahwa mekanisme untuk keterlibatan

²¹ Mikryukov, V. A. (2023). “The study of peculiarities of legal analogy in Russia of the civil law regime of dividends for commercial businesses”. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2236359.

²² Mikryukiv, V.A. (2023). *Ibid*

²³ Deshpande, V. S. (1991). “Review Of Precedent In The Indian Legal System, by A. Laxminath”. *Journal of the Indian Law Institute*, 33(3), 465–469.

²⁴ Francavilla, D. (2018). “Diversity and the Judiciary in India: Supreme Court judges in Indian society”. *Federalismi. it*, (speciale 5/2018), 106-123.

²⁵ Duve, T. (2018). “Legal traditions: A dialogue between comparative law and comparative legal history”. *Comparative Legal History*, 6(1), 15-33.

²⁶ Deorsola, A. B., Leal, M. C. M. R., Cavalcante, M. D., Schmidt, I. J., & Braga, E. J. (2017). “Intellectual property and trademark legal framework in BRICS countries: A comparative study”. *World Patent Information*, 49, 1-9.

²⁷ Duggan, N., Hooijmaaijers, B., Rewizorski, M., & Arapova, E. (2022). “Introduction: ‘The BRICS, Global Governance, and Challenges for South–South Cooperation in a Post-Western World’”. *International Political Science Review*, 43(4), 469-480.

²⁸ Chawla, N., Kumar, B., & Patel, G. (2022). “Insolvency resolution and doing business reforms in BRICS Nations: A comparative study”. *Research Square*, 2, 1-29.

masyarakat sipil dan publik sudah ada.²⁹ Di negara BRICS, masalah dalam hukum perdata terkait perlindungan konsumen dan lingkungan melibatkan kebutuhan penerapan langkah-langkah perlindungan konsumen yang lebih menyeluruh, belum terselesaikannya permasalahan dalam Undang-undang perlindungan konsumen, dan dampak permasalahan lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan.³⁰ Selain itu, meningkatnya jumlah masalah lingkungan hidup di negara-negara BRICS telah menyebabkan perumusan Undang-undang dan peraturan yang sesuai untuk mencapai pembangunan yang relatif stabil dan berkelanjutan.³¹

Keterbatasan penelitian hukum perdata terhadap negara-negara BRICS saat ini adalah kurangnya perhatian terhadap peran yang dimainkan oleh aktor-aktor masyarakat sipil dari negara-negara tersebut. Meskipun terdapat banyak literatur mengenai hubungan antar pemerintah dan meningkatnya kehadiran perusahaan-perusahaan dari negara dalam BRICS, hanya terdapat sedikit perhatian yang diberikan terhadap keterlibatan aktor-aktor masyarakat sipil dalam penelitian hukum perdata mereka.³² Keterbatasan ini menghambat pemahaman komprehensif mengenai lanskap hukum di negara-negara BRICS dan potensi dampak masyarakat sipil terhadap lembaga hukum dan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini, dengan pendekatan komparatif terhadap hukum perdata di India dan Rusia dalam konteks BRICS, memberikan pemahaman komprehensif tentang peran hukum perdata dalam

pembangunan ekonomi. Melalui studi kasus dan analisis, penelitian ini menyoroti kekuatan dan kelemahan hukum perdata di kedua negara, memberikan wawasan praktis yang relevan terhadap hubungan antara hukum perdata dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini menekankan implikasi praktis dan nilai kebijakan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan bisnis di India dan Rusia dalam konteks pembentukan lanskap ekonomi global.

B. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini melibatkan tinjauan sistematis dan menyeluruh terhadap literatur akademis, teks hukum, dokumen kebijakan, dan laporan relevan³³ mengenai keterkaitan antara hukum perdata dan pembangunan ekonomi di negara India dan Rusia dalam konteks BRICS. Artikel dan dokumen disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Hanya materi yang secara langsung membahas hubungan antara hukum perdata dan pembangunan ekonomi di kedua negara yang disertakan.

Proses seleksi bertujuan untuk menjaga ketelitian dan relevansi dalam tinjauan. Data yang relevan dari literatur terpilih diekstraksi dan diorganisasikan untuk mengidentifikasi tema, tren, dan pola utama³⁴. Analisis komparatif digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dalam peran hukum perdata di India dan Rusia. Metodologi ini juga mencakup diskusi mengenai keterbatasan tinjauan literatur, mengatasi potensi bias dan kesenjangan dalam penelitian yang ada³⁵.

²⁹ John, L. (2012). “Engaging BRICS: Challenges and opportunities for civil society”. *Oxfam India Working Papers Series*. 12, 1-31.

³⁰ Elena, O., & Elena, T. (2020). “The protection of consumer rights in the digital economy conditions—the experience of the BRICS countries”. *BRICS Law Journal*, 7(2), p.118-147.

³¹ Liu M. (2022). “Environmental Sustainability Impact of Environmental Protection Regulations on the BRICS Countries”. *Journal of environmental and public health*, 2022, 4626387. <https://doi.org/10.1155/2022/4626387>.

³² Poskitt, A., Shankland, A., & Tacla, K. (2016). “Civil society from the BRICS: emerging roles in the new international development landscape” (No. IDS Evidence Report; 173). IDS.

³³ Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., Rusli, M. H. M. (2024). “Implementation approach in legal research”. *International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS)*, 13(2), 180-188. <http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>

³⁴ Widyastuti, T. V., Marsisno, W., Udin, A. F., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penelitian Transformatif; Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Penerbit Indonesia

³⁵ Noor, R. S., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Kristanto, K. (2024). “Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Hukum Perdata dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) telah menjadi subyek berbagai penelitian dan laporan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). Menurut laporan Kamar Dagang AS, negara-negara BRICS mendapat nilai terburuk dalam hal perlindungan hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual lainnya, sedangkan India mendapat nilai terendah. India berada di urutan terakhir dengan 6,24 poin, yang mencerminkan skor rendah pada masing-masing lima kategori yang diperiksa oleh Pugatch Consilium, sebuah firma penelitian dan analisis internasional yang berspesialisasi dalam ekonomi pengetahuan. Tiongkok berada di urutan kesepuluh dengan skor 9,13, di bawah Brasil dengan 9,57 poin dan Rusia dengan 11,17.³⁶

Penerapan konsep hak kekayaan intelektual di negara-negara berkembang seringkali didorong oleh tekanan eksternal dibandingkan kebutuhan dalam negeri. Rezim kekayaan intelektual saat ini memang berpedoman terhadap kesejahteraan masyarakat sipil untuk mendorong perolehan hak tiap individu, namun sistem ini dapat menciptakan inefisiensi dengan mengacaukan hak milik dengan hak milik atas gagasan itu sendiri hingga menyebabkan adanya kendali atas penggunaan gagasan setelah penjualan suatu benda dan menciptakan monopoli informasi.³⁷ Meskipun begitu, saat ini negara-negara BRICS, khususnya Brasil, telah menolak keinginan investasi asing langsung yang tidak terkendali dengan kekawa-

tiran dapat berdampak pada adopsi dan penegakan hak kekayaan intelektual.³⁸

Perekonomian digital di negara-negara dalam konteks BRICS menghadapi hambatan yang semakin besar terhadap kebebasan informasi dan berekspresi, dimana pemerintah mengalami kesulitan dalam menyusun Undang-undang untuk semua skenario. Negara-negara BRICS memiliki Undang-undang merek dagang yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan yang seragam terhadap hak kekayaan intelektual.³⁹ Berikut adalah analisis perbandingan sistem hukum perdata yang berlaku terhadap perlindungan HAKI di India dan Rusia dalam konteks BRICS:

a. Rusia

Pemahaman tentang hak kekayaan intelektual di Rusia telah mengalami transformasi signifikan sepanjang abad ke-20. Pada tahun 1931, kebijakan diterapkan dimana negara memegang haknya, dan penemu hanya menerima gaji nominal beserta "sertifikat penemuan". Pergeseran penting terjadi pada tahun 2006 dengan diakuinya hak kekayaan intelektual bagi penemu berdasarkan IV KUH Perdata.⁴⁰ Pendaftaran merek dagang di Rusia dilakukan melalui Layanan Federal untuk Kekayaan Intelektual (*Rospatent*) yang beroperasi di bawah Kementerian Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia. *Rospatent* berfungsi sebagai otoritas eksekutif federal yang bertanggung jawab mengawasi dan mengawasi perlindungan hukum dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang.⁴¹

the 2030 Sustainable Development Goals". *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2173-e2173. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173>

³⁶ Reuters. (2012). BRICs score lowest on intellectual property protection index. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/idUSL1E8NA779/>.

³⁷ Fehder, D. C., Murray, F., & Stern, S. (2014). "Intellectual property rights and the evolution of scientific journals as knowledge platforms". *International Journal of Industrial Organization*, 36, 83-94.

³⁸ Bird, R. C., & Cahoy, D. R. (2006). The emerging BRIC economies: Lessons from intellectual property negotiation and enforcement. *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.*, 5, p.400.

³⁹ Deorsola, A. B., Leal, M. C. M. R., Cavalcante, M. D., Schmidt, I. J., & Braga, E. J. (2017). "Intellectual property and trademark legal framework in BRICS countries: A comparative study". *World Patent Information*, 49, 1-9.

⁴⁰ O'Connor, T. S. (2011). "Development of intellectual property laws for the Russian Federation". *Journal of Business Research*, 64(9), p.1011-1016.

⁴¹ *Rospatent*, Federal Service for Intellectual Property. (n.d.). "Ministry of Economic Development of the Russian Federation". Retrieved from

Peraturan hak kekayaan intelektual di Rusia, sebagaimana dituangkan dalam Bagian IV KUH Perdata sejak 1 Desember 2007 yang mengatur tentang pendaftaran merek, Bab 76, x2 KUH Perdata, Pedoman Permohonan Merek Dagang, dan Peraturan Biaya mengatur proses pendaftaran, yang mencakup merek dagang untuk barang dan jasa, serta merek dagang kolektif.⁴² Meskipun tidak ada ketentuan untuk sertifikasi merek dagang, Rusia mengizinkan pendaftaran tanda nominatif, kiasan, tiga dimensi, dan kombinasinya, termasuk merek dagang non-tradisional seperti merek dagang suara, bau, dan gerak.⁴³

Larangan mutlak meliputi tanda-tanda yang tidak dapat membedakan barang, lambang negara, dan tanda-tanda yang bertentangan dengan kepentingan atau kesusilaan umum. Rusia mengakui "kekhasan yang didapat", dan terdapat hambatan tambahan untuk tanda-tanda yang berkaitan dengan benda warisan budaya. Alasan relatif penolakan mencakup konflik dengan hak pihak ketiga yang ada, dan perlindungan hukum atas merek dagang terkenal sangat luas dan berlangsung tanpa batas waktu.⁴⁴

b. India

Undang-undang HKI di India telah berkembang sebagai respons terhadap kemajuan teknologi dan perubahan Undang-undang kekayaan intelektual secara global. Undang-undang merek dagang yang berlaku saat ini di India telah

berlaku sejak tahun 1999.⁴⁵ Pendaftaran merek dagang di India diawasi oleh Pengawas Paten, Desain, dan Merek Dagang di bawah Departemen Kebijakan dan Promosi Industri, Kementerian Perdagangan dan Industri. Kantor pusatnya terletak di Mumbai, dengan cabang tambahan di New Delhi, Kolkata, Chennai, dan Ahmedabad.⁴⁶

Pendaftaran diatur oleh Undang-undang Merek Dagang tahun 1999, yang mulai berlaku pada bulan September 2003, menggantikan Undang-undang Perdagangan dan Barang Dagangan sebelumnya tahun 1958 sejalan dengan ketentuan TRIPS. Diubah pada tahun 2010, Undang-undang Merek Dagang terdiri dari 159 pasal yang membahas aspek prosedural dan substantif perlindungan merek. Selain itu, peraturan ini sejalan dengan Peraturan Merek Dagang tahun 2002, yang terakhir diubah pada tahun 2013.⁴⁷

Undang-undang merek dagang India berlaku berdasarkan pengajuan pertama dan telah mengalami perubahan signifikan. Konsep yang diperluas memungkinkan pendaftaran desain, dan jangka waktu perlindungan ditingkatkan menjadi sepuluh tahun. Merek kolektif, merek sertifikasi, dan merek layanan kini dapat didaftarkan, sehingga memperluas cakupannya. Undang-undang ini mengakui merek-merek terkenal, sehingga memberikan penegakan hukum di luar produk atau layanan terdaftar jika terjadi potensi persaingan tidak sehat.⁴⁸

Peningkatan perlindungan terhadap kemungkinan kebingungan memungkinkan pemegang merek dagang untuk menegaskan hak atas barang serupa yang menyebabkan kebingungan. Kelayakan suatu tanda dibagi menjadi larangan absolut dan larangan relatif, sedangkan larangan relatif mencakup tanda yang tidak memiliki karakter

<http://www.rupto.ru/rupto/portal/7bea6e78-fbd2-11e0-e807-8e000200001f?lang%4en>.

⁴² The Civil Code of the Russian Federation. (2006). WIPO Lex. IV-230FZ. Retrieved from <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru083en.pdf>.

⁴³ Kratiuk, A. (2013). Working with the experts: agile registration strategies are crucial in Russia, with foreign applicants required to be represented by Russian trademark attorneys who are registered at the RPTO. *World Trademark Review*, 98-99. Retrieved from <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/42/Country-correspondents/Russia-Gorodissky-Partners>.

⁴⁴ The Civil Code of the Russian Federation. (2006). WIPO Lex. IV-230FZ. Retrieved from <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru083en.pdf>.

⁴⁵ Bird, R. C., & Cahoy, D. R. (2006). *Op. Cit.* p.400

⁴⁶ IPIndia, Intellectual Property India Office, Gov. India. (n.d.). Retrieved from <http://www.ipindia.nic.in>.

⁴⁷ IPIndia. (2010). The Trade Marks Act 1999, WipoLex. Retrieved from <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id%413240>.

⁴⁸ IPIndia. (2010). The Trade Marks Act 1999, WipoLex. Retrieved from <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id%413240>.

pembeda. Larangan relatif mencakup pembatasan pendaftaran tanda yang identik atau mirip dengan merek sebelumnya, unsur kimia, nama orang lain, dan nama orang yang meninggal tanpa persetujuan. Bab III, Pasal 18(1) menguraikan proses permohonan pendaftaran merek dagang.⁴⁹

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Rusia merupakan negara yang lebih banyak bergabung dalam perjanjian kekayaan intelektual, baik dalam konteks perbandingan terhadap hukum perdata kekayaan intelektual India maupun dengan negara dalam kelompok BRICS lainnya. Prosedur pendaftaran merek dagang berbeda di antara kedua negara tersebut, namun terdapat kesamaan dalam mengikuti model terpadu. Undang-undang kekayaan intelektual yang dianut oleh India cenderung lebih spesifik mengingat sistematika sosial-kulturalnya yang lebih kental. India juga mematuhi standar TRIPS, Ada kesepakatan bulat mengenai larangan mutlak di kedua negara.

India dan Rusia telah menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda dalam Undang-undang HKI mereka. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), permohonan paten oleh penduduk India telah mengalami pertumbuhan sebesar 31,6% pada tahun 2022, sehingga memperpanjang pertumbuhan selama 11 tahun yang tidak tertandingi oleh negara lain mana pun di antara 10 pelapor teratas.⁵⁰ Di sisi lain, pengajuan permohonan paten di Rusia oleh perusahaan asing menurun pada tahun 2022, dengan penurunan jumlah pengajuan sebesar 30% karena perusahaan asing menarik diri dari pasar.⁵¹ Selain itu, India telah didesak untuk memperkuat

Undang-undang hak cipta dan kekayaan intelektualnya untuk lebih mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Data terhadap perbandingan pertumbuhan penerapan Undang-undang HKI ditunjukkan pada grafik di bawah



Gambar 1. Perbandingan pertumbuhan HKI global 2023. Sumber: WIPO (2023)

2. Perbandingan Hukum Perdata dalam Sengketa Konsumen dan Perlindungan Lingkungan

Perbedaan Undang-undang perlindungan konsumen di negara-negara BRICS dan Amerika Serikat (AS) sebagai negara maju acuan seluruh negara sangatlah signifikan. Amerika mempunyai kerangka hukum yang mapan untuk perlindungan konsumen, termasuk Undang-undang seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Komisi Perdagangan Federal, dan Undang-undang Pelaporan Kredit yang Adil. Undang-undang ini memberikan perlindungan ekstensif kepada konsumen Amerika di berbagai bidang seperti praktik perdagangan yang adil, pelaporan kredit, dan keamanan produk.⁵² Di negara-negara BRICS, langkah-langkah perlindungan konsumen belum sempurna dan banyak

⁴⁹ Brief Article. (2004). New trademark law takes effect in India. *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 16, 21.

⁵⁰ WIPO. (2023). World Intellectual Property Indicators Report: Record Number of Patent Applications Filed Worldwide in 2022. Retrieved from https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2023/article_0013.html.

⁵¹ Papula Nevinpat. (2023). Patent application filings in Russia by foreign companies decreased in 2022. Retrieved from <https://www.papula-nevinpat.com/patent-application-filings-in-russia-by-foreign-companies-decreased-in-2022/>.

⁵² Shapiro, C. (1983). “Consumer protection policy in the United States”. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft/Journal of Institutional and Theoretical Economics*, (H. 3), p.527-544.

masalah yang perlu diselesaikan melalui penerapan hukum dan peraturan masing-masing negara secara lebih menyeluruh.⁵³ Perkembangan regulasi di negara-negara BRICS saat ini bergerak menuju penyediaan informasi dan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen dalam kondisi ekonomi digital.⁵⁴

Selain itu, adapun masalah terpisah di negara-negara BRICS dalam hal status hukum publik dari agregator platform *online*. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak konsumen dan status hukum kontrak di tempat yang diselesaikan melalui *platform* ini.⁵⁵ Negara-negara BRICS memiliki model kelembagaan yang berbeda dalam penegakan hukum persaingan usaha, yang dapat berdampak pada perlindungan hak-hak konsumen dan perkembangan persaingan di pasar masing-masing.⁵⁶ Jika membicarakan tentang hukum perdata terkait wawasan lingkungan, pesatnya perkembangan ekonomi di negara-negara ini telah menimbulkan masalah lingkungan hidup, dan penerapan Undang-undang perlindungan lingkungan hidup diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Namun, efektivitas Undang-undang ini dibatasi oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya mekanisme penegakan hukum, kurangnya kemauan politik, dan pendanaan yang tidak memadai.⁵⁷ Berikut merupakan analisis spesifik terkait perbandingan hukum perdata dalam hal sengketa hak konsumen dan pemberdayaan lingkungan:

⁵³ Elena, O., & Elena, T. (2020). *Loc.cit*

⁵⁴ Yao, J. (2017). Consumer Protection Law in the BRICS Countries and Their Future Cooperation. In R. J. Neuwirth, A. Svetlicinii, & D. De Castro Halis (Eds.), *The BRICS-Lawyers' Guide to Global Cooperation* (p. 247–269). chapter, Cambridge: Cambridge University Press.

⁵⁵ Elena, O., & Elena, T. (2020). *Op.cit*

⁵⁶ Svetlicinii, A., & Zhang, J. J. (2017). “The Competition Law Institutions in the BRICS Countries: Developing Better Institutional Models for the Protection of Market Competition. *Chinese*”. *Political Science Review*, 2(1), p.85-100.

⁵⁷ International Labour Office. (2022). Employment and just transition to sustainability in the BRICS countries. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/presentation/wcms_845711.pdf.

1. Rusia

Saat ini, Rusia memiliki Undang-undang perlindungan konsumen yang menangani permasalahan seperti kualitas produk, keamanan, dan periklanan. Sengketa konsumen biasanya ditangani melalui pengadilan, namun mekanisme penyelesaian sengketa alternatif juga tersedia.⁵⁸ Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberdayakan konsumen Rusia dengan memberikan mereka hak-hak dasar dan pemulihan. Peraturan per-Undang-undangan tersebut berorientasi pada konsumen dan menekankan pada perlindungan hak dan kepentingan konsumen. Penerapan Undang-undang tersebut telah mengarah pada berkembangnya praktik peradilan yang kaya dan telah memperbaiki situasi di bidang perlindungan konsumen.⁵⁹

Terlepas dari manfaatnya, kerangka pertanggungjawaban produk di Rusia tersebar di berbagai Undang-undang, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan. Beberapa peraturan, seperti kewajiban bagi produsen untuk melakukan pra-instal perangkat lunak tertentu, juga dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kerahasiaan informasi dan komunikasi. Selain itu, Undang-undang perlindungan konsumen Rusia dapat meningkatkan biaya aktivitas bisnis dengan menentukan batasan perilaku bisnis.⁶⁰

Selama masa transisi Rusia sejak awal tahun 1990-an, negara tersebut melakukan reformasi kebijakan lingkungan besar-besaran, termasuk yang berkaitan dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penipisan lapisan ozon. Saat ini, Rusia memiliki kerangka hukum dan peraturan yang komprehensif di bidang lingkungan, yang mencakup kualitas udara dan air, pengelolaan

⁵⁸ Vorontsova, E. V., & Vorontsov, A. L. (2020, March). Legal Regulation of the Quality and Safety of Food Products: Analysis of the Current State in the Context of Ensuring National Security of Russia. In “*New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development*”(NSRBCPED 2019) (p.997-1002). Atlantis Press.

⁵⁹ Nehf, J. P. (1992). Empowering the Russian consumer in a market economy. *Mich. J. Int'l L.*, 14, p.739.

⁶⁰ *Ibid*

limbah, dan keamanan bahan kimia.⁶¹ Undang-undang Perlindungan Lingkungan Rusia hanya memperbolehkan perusahaan untuk membuang bahan berbahaya setelah mendapat izin dan dikenakan pembayaran biaya secara berkala berdasarkan jenis dan jumlah bahan tersebut. Transisi yang sedang berlangsung di negara ini menuju perekonomian berbasis pasar telah mengarah pada restrukturisasi dan konsolidasi perekonomian yang dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan polusi di sektor industri.⁶²

Meskipun terdapat Undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang baru, kepatuhan terhadap peraturan ini masih belum merata dan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Rusia masih lemah.⁶³ Selain itu, komitmen Rusia untuk melindungi lingkungannya dari kerusakan di masa depan tampaknya lemah karena negara tersebut menghadapi permasalahan seperti polusi, pengelolaan limbah, dan perubahan iklim. Masalah lingkungan hidup di Rusia menimbulkan ancaman besar baik bagi warga negara tersebut maupun wilayah lainnya. Aktivisme lingkungan hidup semakin berkurang sejak pecahnya Uni Soviet dan pemerintah Rusia dituduh memperlakukan informasi limbah nuklir dan senjata kimia tertentu sebagai rahasia negara.⁶⁴

2. India

Undang-undang Perlindungan Konsumen India telah mengalami beberapa perubahan selama bertahun-tahun, yang terbaru adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 2019. Undang-undang baru ini mengusulkan langkah-langkah efektif dan memperketat aturan yang ada untuk lebih melindungi hak-hak konsumen.⁶⁵ Namun, masih ada kebutuhan untuk

perbaikan dalam penerapan Undang-undang ini, terutama di sektor e-commerce, di mana konsumen menghadapi tantangan seperti ketidakpastian yurisdiksi jika terjadi perselisihan.⁶⁶

Sebuah studi yang menganalisis rangkaian infrastruktur hukum saat ini, termasuk Undang-undang Perlindungan Konsumen India, tahun 2019 dan Peraturan Perlindungan Konsumen (*E-commerce*), tahun 2020, menemukan bahwa pertumbuhan pesat dan tren *e-commerce* yang muncul telah mengubah preferensi konsumen untuk membeli secara *online* dan langkah-langkah pemerintah untuk melindungi konsumen tidak sejalan dengan perubahan-perubahan ini.⁶⁷ Studi lain menemukan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 1986 yang merupakan Undang-undang pertama di India yang bertujuan untuk melindungi konsumen telah bersifat efektif dalam meringankan konsumen dari pemain dominan dan berkuasa di pasar.⁶⁸

Undang-undang perlindungan lingkungan hidup di India menimbulkan pro dan kontra. Beberapa di antaranya yang mendukung adalah ketentuan khusus dalam Konstitusi India untuk perlindungan dan perbaikan lingkungan, seperti Pasal 48A, yang mengamanatkan negara untuk menjaga hutan dan satwa liar.⁶⁹ Meskipun demikian, dengan jumlah penduduk yang sangat besar saat ini, sebagian besar penduduk India masih hidup dengan tingkat polusi udara yang

⁶¹ Ratsiborinskaya, D. (2010). Russian Environmental Law-an Overview For Business.

⁶² EIA. (2007). Russia: Environmental Issues. Retrieved from https://www.lehman.edu/faculty/rwhittaker/Day02-Research/Russia_%20Environmental%20Issues.pdf.

⁶³ EIA. (2007). *Ibid*

⁶⁴ IRP. (1999). The Environmental Outlook in Russia. Retrieved from https://irp.fas.org/nic/environmental_outlook_russia.html.

⁶⁵ Didwal, A & Negi, R., (2022). “Legal and Economic Perspective of the Consumer Protection Act, 2019 in

India: An Overview.” *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 10(08), p.375-383. <https://doi.org/10.18535/ijrm/v10i08.11a01>

⁶⁶ Satyan, K. (2015). “E-Commerce and Consumer Rights: Applicability of Consumer Protection Laws in Online Transactions in India”. Available at SSRN 2626027.

⁶⁷ Chawla, N., & Kumar, B. (2022). “E-Commerce and Consumer Protection in India: The Emerging Trend”. *Journal of business ethics : JBE*, 180(2), p.581–604. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04884-3>

⁶⁸ Jain, S. (2020). “How Effective is the consumer Protection Act 1986 of India?”. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6s), 3589 - 3605. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/2456>

⁶⁹ Bhullar, L. (2022). “Environmental Constitutionalism and Duties of Individuals in India”. *Journal of Environmental Law*, 34(3), p. 399-418.

berbahaya. Dampak efektif dari pengendalian yang ada dikompensasi oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kebijakan dan tindakan yang ada dapat menjadikan kualitas udara berada di bawah kepatuhan NAAQS dan langkah-langkah pembangunan berkelanjutan dapat memberikan berbagai manfaat tambahan.⁷⁰

Di sisi lain, kritik utama terhadap Undang-undang India adalah pelanggaran pengawasan peraturan kawasan hutan dengan memodifikasi Undang-undang tahun 1980, yang dapat menyebabkan aktivitas komersial dan pembangunan infrastruktur di kawasan hijau tidak terkendali. Perubahan dalam Undang-undang konservasi hutan juga dapat menyebabkan sekitar 20-28% tutupan hutan yang ada kehilangan perlindungan peraturannya.⁷¹

Berdasarkan hasil penelusuran data yang ada, dapat dinilai bahwa India dan Rusia bukanlah pionir dalam kinerja indikator lingkungan di dalam konteks negara BRICS. Hingga saat ini, Brasil masih memiliki kinerja luar biasa dalam indikator lingkungan dibandingkan negara-negara BRICS lainnya, dengan cakupan hutan sebesar 60% dan penggunaan energi terbarukan yang semakin meningkat.⁷² Namun, baik India dan Rusia beserta negara-negara BRICS lainnya telah menjadikan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama dalam kebijakan mereka, dan semuanya telah merumuskan Undang-undang dan peraturan yang sesuai untuk menanggapi permasalahan lingkungan yang ada atau yang mungkin timbul dari pembangunan ekonomi

mereka.⁷³ Hasil penilaian menunjukkan bahwa dengan dukungan Undang-undang lingkungan hidup yang relevan, dampak berkelanjutan telah dihasilkan terhadap lingkungan negara-negara BRICS.⁷⁴

Undang-undang perlindungan lingkungan dan pertumbuhannya di India dan Rusia menunjukkan beberapa perbedaan. Di Rusia, terdapat fokus untuk menggandakan PDB selama 10 tahun ke depan, yang mungkin berdampak pada upaya perlindungan lingkungan. Negara ini telah mengesahkan Undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, namun kepatuhan dan penegakan hukum masih belum merata dan lemah, yang menunjukkan lemahnya komitmen untuk melindungi lingkungan.⁷⁵ Di sisi lain, India telah dengan cepat melakukan transisi ke energi ramah lingkungan dan telah mengumumkan tujuannya untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2070. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan dan pertumbuhan berkelanjutan. Transisi energi bersih di India dipandang sebagai peluang ekonomi yang sangat besar, dan negara ini memelopori model pembangunan ekonomi baru yang dapat menghindari pertumbuhan intensif karbon.⁷⁶

Data Dewan Bisnis untuk Kerja Sama dengan India, Rusia telah mengerjakan proyek bersama dengan India di berbagai bidang, termasuk minyak dan gas, pertambangan batu bara, dan transportasi. Kepemimpinan India menaruh perhatian besar pada implementasi proyek energi dengan Rusia di Siberia Timur, Timur Jauh, dan Arktik. Rusia dan India bermaksud untuk melanjutkan kerja sama di bidang pelatihan profesional di bidang geolokasi dan eksplorasi, elektronik, teknik, TI, teknik tenaga air dan panas, efisiensi energi, serta pengembangan

⁷⁰ Purohit, P., Amann, M., Kiesewetter, G., Rafaj, P., Chaturvedi, V., Dholakia, H. H., ... & Sander, R. (2019). “Mitigation pathways towards national ambient air quality standards in India”. *Environment international*, p.133, 105147.

⁷¹ Verma, A. (2021). “Law Of Environment In India: Problems And Challenges In Its Enforcement”. *Research Ambition an International Multidisciplinary e-Journal*, 6(II), p.17-26.

⁷² Nguyen, & Khominich, I. P. (2023). “The measurement of green economic quality in the BRICS countries: Should they prioritize financing for environmental protection, economic growth, or social goals?” *Russian Journal of Economics* (9, Issue 2, p.183–200). <https://doi.org/10.32609/j.ruje.9.101612>

⁷³ Liu M. (2022). *Loc.cit.*.

⁷⁴ Udeagha, M. C., & Ngepah, N. (2023). “The drivers of environmental sustainability in BRICS economies: Do green finance and fintech matter?”. *World Development Sustainability*, 3, 100096.

⁷⁵ EIA. (2007). *Loc.cit.*

⁷⁶ IEA. (2022). India’s clean energy transition is rapidly underway, benefiting the entire world. <https://www.iea.org/commentaries/india-s-clean-energy-transition-is-rapidly-underway-benefiting-the-entire-world>.

dan pembangunan fasilitas yang menghasilkan energi dari sumber non-konvensional.⁷⁷

D. Simpulan

Kinerja lingkungan yang mencolok tidak terjadi di India atau Rusia dibandingkan dengan negara BRICS lainnya dalam hal cakupan hutan dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Meskipun demikian, India, Rusia, dan seluruh negara BRICS telah menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama dalam kebijakan mereka, merumuskan Undang-undang dan peraturan yang relevan untuk mengatasi potensi masalah lingkungan yang timbul dari pembangunan ekonomi. Penilaian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-undang lingkungan yang tepat telah berkontribusi pada dampak yang berkelanjutan terhadap lingkungan di seluruh negara-negara BRICS.

Kekayaan intelektual, analisis menyoroti Rusia sebagai negara yang paling aktif terlibat dalam perjanjian kekayaan intelektual dalam konteks BRICS dan jika dibandingkan dengan India. Prosedur pendaftaran merek dagang berbeda-beda, namun kedua negara memiliki kepatuhan terhadap model terpadu. Undang-undang kekayaan intelektual Rusia cenderung lebih general dibandingkan India yang bersifat cukup spesifik. Kesepakatan bulat ada mengenai larangan mutlak di kedua negara meskipun persyaratan Protokol Madrid masih tertunda, sehingga mencerminkan komitmen mereka terhadap standar kekayaan intelektual global meskipun menghadapi permasalahan infrastruktur. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam menjaga prestasi lingkungan yang tengah berkembang di antara India dan Rusia dengan kolaborasi yang cukup signifikan dalam produksi energi terbarukan. Di bidang kekayaan

intelektual, pola yang diidentifikasi menunjukkan peluang untuk kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di antara India dan Rusia. Pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan seharusnya mempertimbangkan wawasan ini saat merumuskan strategi perlindungan lingkungan dan manajemen kekayaan intelektual. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan informasi berharga untuk membimbing praktik berkelanjutan dan mendorong kolaborasi di antara negara-negara India dan Rusia dalam konteks BRICS di ranah hukum dan lingkungan

Daftar Pustaka

Buku

- Rolland, S. E. (2013). “The BRICS’ contributions To The Architecture And Norms Of International Economic Law”. In *Proceedings of the ASIL Annual Meeting Vol. 107, p.164-170*. Cambridge University Press. 2013.
- Vorontsova, E. V., & Vorontsov, A. L. (2020, March). “Legal Regulation of the Quality and Safety of Food Products: Analysis of the Current State in the Context of Ensuring National Security of Russia”. In *“New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development”*. (NSRBCPED 2019) (p.997-1002). Atlantis Press.
- Widyastuti, T. V., Marsisno, W., Udin, A. F., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penelitian Transformatif; Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Penerbit Indonesia

Artikel Jurnal

- Andreas, V. “Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi”. *Lex Privatum*, 7(5). 2020.

⁷⁷ Business Council for Cooperation with India. (2023). Promising areas of cooperation between India and Russia. Retrieved from <https://russiaindiabusiness.com/business-in-russia/promising-areas-of-cooperation-between-india-and-russia/>.

- Azizah, S. "Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). 2012.
- Bhullar, L. "Environmental Constitutionalism and Duties of Individuals in India". *Journal of Environmental Law*, 34(3), p.399-418. 2022.
- Bird, R. C., & Cahoy, D. R. "The emerging BRIC economies: Lessons from intellectual property negotiation and enforcement". *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.*, 5, p.400. 2006.
- Brief, Article.. "New trademark law takes effect in India". *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 16, p.21. 2004.
- Chawla, N., & Kumar, B. "E-Commerce and Consumer Protection in India: The Emerging Trend". *Journal of business ethics : JBE*, 180(2), p.581-604. 2022. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04884-3>
- Chawla, N., Kumar, B., & Patel, G. "Insolvency resolution and doing business reforms in BRICS Nations: A comparative study". *Research Square*, 2, p.1-29. 2022.
- Deorsola, A. B., Leal, M. C. M. R., Cavalcante, M. D., Schmidt, I. J., & Braga, E. J. "Intellectual property and trademark legal framework in BRICS countries: A comparative study". *World Patent Information*, 49, p.1-9. 2017.
- Deshpande, V. S. "Review Of Precedent In The Indian Legal System, by A. Laxminath". *Journal of the Indian Law Institute*, 33(3), p.465-469. 1991.
- Didwal, A & Negi, R., "Legal and Economic Perspective of the Consumer Protection Act, 2019 in India: An Overview. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 10(08), p.375-383. 2022. <https://doi.org/10.18535/ijprm/v10i08.11a01>
- Duggan, N., Hooijmaaijers, B., Rewizorski, M., & Arapova, E. "Introduction: The BRICS, Global Governance, and Challenges for South-South Cooperation in a Post-Western World". *International Political Science Review*, 43(4), p.469-480. 2022.
- Duve, T. "Legal Traditions: A Dialogue Between Comparative Law And Comparative Legal History". *Comparative Legal History*, 6(1), p.15-33. 2018.
- Elena, O., & Elena, T. "The protection of consumer rights in the digital economy conditions-the experience of the BRICS countries". *BRICS Law Journal*, 7(2), p.118-147. 2020.
- Fehder, D. C., Murray, F., & Stern, S. Intellectual property rights and the evolution of scientific journals as knowledge platforms. *International Journal of Industrial Organization*, 36, p.83-94. 2014.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., Rusli, M. H. M. "Implementation Approach In Legal Research". *International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS)*, 13(2), p.180-188. 2024. <http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Hidayat, A. "Kajian Kritis Terhadap Hukum Perdata (KUHPERDATA) Dalam Aspek Filosofis. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), p.20-31. 2019.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. "Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi". *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), p.83-93. 2020.
- Iyan, R. Y. "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(5). 2012.
- Jain, S. "How Effective is the consumer Protection Act 1986 of India?". *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6s), p. 3589 - 3605. 2020.
- John, L. "Engaging BRICS: Challenges and opportunities for civil society". *Oxfam India Working Papers Series*. 12, p.1-31. 2012.

- Kratiuk, A. "Working with the experts: agile registration strategies are crucial in Russia, with foreign applicants required to be represented by Russian trademark attorneys who are registered at the RPTO". *World Trademark Review*, p.98-99. 2013.
- Liu M. "Environmental Sustainability Impact of Environmental Protection Regulations on the BRICS Countries". *Journal of environmental and public health*. 4626387. 2022, <https://doi.org/10.1155/2022/4626387>.
- Lowe, P. "The rise of the BRICS in the global economy". *Teaching geography*, 41(2), p.50-53. 2016.
- Mikryukov, V. A. "The study of peculiarities of legal analogy in Russia of the civil law regime of dividends for commercial businesses". *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2236359. 2023.
- Mustafa, S., Zafar, A., & Akhter, S. "BRICS: Is the Group Really Creating Impact?". *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)*, 2(6). 2017.
- Nehf, J. P. Empowering the Russian consumer in a market economy. *Mich. J. Int'l L.*, 14, p.739. 1992.
- Nguyen, & Khominich, I. P. "The measurement of green economic quality in the BRICS countries: Should they prioritize financing for environmental protection, economic growth, or social goals?". *Russian Journal of Economics* (9, Issue 2, p.183–200). 2023. <https://doi.org/10.32609/j.ruje.9.101612>
- Noor, R. S., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Kristanto, K. "Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable Development Goals)". *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), p.e2173-e2173. 2024.<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173>
- O'Connor, T. S. "Development of intellectual property laws for the Russian Federation". *Journal of Business Research*, 64(9), p.1011-1016. 2011.
- Purohit, P., Amann, M., Kiesewetter, G., Rafaj, P., Chaturvedi, V., Dholakia, H. H., & Sander, R. "Mitigation pathways towards national ambient air quality standards in India". *Environment international*, 133, 105147. 2019.
- Putri, F. M., & Santoso, M. P. T. "BRICS Diplomacy: Building Bridges for Global Cooperation". *Politics and Humanism*, 2(1), p.10-21. 2023.
- Ramanujam, N., & Caivano, N. "The BRIC Nations and the anatomy of economic development: the core tenets of Rule of Law". *Law and Development Review*, 9(2), p.269-320. 2016.
- Satyan, K. "E-Commerce and Consumer Rights: Applicability of Consumer Protection Laws in Online Transactions in India". *Available at SSRN 2626027*. 2015.
- Schrooten, M. "Brazil, Russia, India, China and South Africa: strong economic growth major challenges". *DIW Economic Bulletin*, 1(4), p.18-22. 2011.
- Shapiro, C. "Consumer protection policy in the United States". *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft/ Journal of Institutional and Theoretical Economics*, (H. 3), p.527-544. 1983.
- Siddiqui, K. (2016). "Will the growth of the BRICs cause a shift in the global balance of economic power in the 21st century?" *International Journal of Political Economy*, 45(4), p.315-338. 2017.
- Sidiq, S. "Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi". *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), p.39-59. 2023.

Svetlicinii, A., & Zhang, J. J. “The Competition Law Institutions in the BRICS Countries: Developing Better Institutional Models for the Protection of Market Competition”. *Chinese Political Science Review*, 2(1), p.85-100. 2017.

Udeagha, M. C., & Ngepah, N. “The drivers of environmental sustainability in BRICS economies: Do green finance and fintech matter?”. *World Development Sustainability*, 3, 100096. 2023.

Verma, A. “Law Of Environment In India: Problems And Challenges In Its Enforcement”. *Research Ambition an International Multidisciplinary e-Journal*, 6(II), p.17-26. 2021.

Hasil Penelitian

Sumbari, T., & Harto, S. (2016). *Pengaruh Reformasi Ekonomi India Mengenai Foreign Direct Investment (Fdi) Terhadap Strategi Investasi Softbank Group Corporation Di India 2013-2016*. Doctoral dissertation, Riau University.

Artikel dalam Antologi dengan Editor

Yao, J. “Consumer Protection Law in the BRICS Countries and Their Future Cooperation. In R. J. Neuwirth, A. Svetlicinii, & D. De Castro Halis” (Eds.), (2017). *The BRICS-Lawyers’ Guide to Global Cooperation* (p.247–269). chapter, Cambridge: Cambridge University Press.

Internet Sources

Business Council for Cooperation with India. (2023). *Promising areas of cooperation between India and Russia*. Retrieved from <https://russiaindiabusiness.com/business-in-russia/promising-areas-of-cooperation-between-india-and-russia/>.

Clifford Chance. (2015). *The Rising Powers: What role does law have to play in the economic development of the BRIC*

countries?. Retrieved from <https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2015/03/the-rising-powers-what-role-does-law-have-to-play-in-the-economic-development-of-the-bric-countries.pdf>.

Dhar, B. (2012). “The BRICS in the emerging global economic architecture”.

EIA. (2007). *Russia: Environmental Issues*. Retrieved from https://www.lehman.edu/faculty/rwhittaker/Day02-Research/Russia_%20Environmental%20Issues.pdf.

European Council. (2023). “Infographic - Impact of sanctions on the Russian economy”. Retrieved from <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/>.

Focus Economics. (2023). *Russia Economic Forecast*. Retrieved from <https://www.focus-economics.com/countries/russia/>.

Francavilla, D. (2018). “Diversity and the Judiciary in India: Supreme Court judges in Indian society”. *Federalismi. it*, (speciale 5/2018), 106-123.

IEA. (2022). “India’s clean energy transition is rapidly underway, benefiting the entire world”. <https://www.iea.org/commentaries/india-s-clean-energy-transition-is-rapidly-underway-benefiting-the-entire-world>.

International Labour Office. (2022). “Employment and just transition to sustainability in the BRICS countries”. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/presentation/wcms_845711.pdf.

IPIndia, “*Intellectual Property India Office*”, Gov. India. (n.d.). Retrieved from <http://www.ipindia.nic.in>.

- IPIndia. (2010). *“The Trade Marks Act 1999”*, WipoLex. Retrieved from <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id¼13240>.
- IRP. (1999). *“The Environmental Outlook in Russia”*. Retrieved from https://irp.fas.org/nic/environmental_outlook_russia.html.
- Papula Nevinpat. (2023). “Patent application filings in Russia by foreign companies decreased in 2022”. Retrieved from <https://www.papula-nevinpat.com/patent-application-filings-in-russia-by-foreign-companies-decreased-in-2022/>.
- Poskitt, A., Shankland, A., & Taela, K. (2016). *“Civil society from the BRICS: emerging roles in the new international development landscape”* (No. IDS Evidence Report; 173). IDS.
- Ratsiborinskaya, D. (2010). “Russian Environmental Law-an Overview For Business”.
- Reuters. (2012). “BRICs score lowest on intellectual property protection –index”. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/idUSL1E8NA779/>.
- Rospatent, Federal Service for Intellectual Property. (n.d.). “Ministry of Economic Development of the Russian Federation”. Retrieved from <http://www.rupto.ru/rupto/portal/7bea6e78-fbd2-11e0-e807-8e000200001f?lang¼en>.
- The Civil Code of the Russian Federation. (2006). WIPO Lex. IV-230FZ. Retrieved from <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru083en.pdf>.
- The Civil Code of the Russian Federation. (2006). WIPO Lex. IV-230FZ. Retrieved from <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru083en.pdf>.
- Trading Economics. (2023). “Russia GDP Annual Growth Rate”. Retrieved from <https://tradingeconomics.com/russia/gdp-growth-annual>.
- WIPO. (2023). World Intellectual Property Indicators Report: Record Number of Patent Applications Filed Worldwide in 2022. Retrieved from https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2023/article_0013.html.
- World Bank. (2023). The World Bank in Russia. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/russia>